

# **KEBIJAKAN REZIM OTORITER TERHADAP ISLAM POLITIK (Studi Kasus Rezim Soeharto Indonesia dan Anwar Sadat Mesir)**

*Mahmud Hamzawi Fahim Usman*

Al-Ayyat District; Giza Province; Egypt

E-mail: mahmududdin@yahoo.com

**Abstract:** *This dissertation titled “The Policies of Authoritarian Regimes towards Political Islam: A Case Study on Soeharto’s and Anwar Sadat’s Regimes” attempts to answer this question: what policies towards Political Islam were adopted by Soeharto’s and Sadat’s regimes and what are the similarities and differences between both of them as well as their underlying factors? This dissertation is a library research with qualitative data using descriptive, interpretative, and analytical approaches based on the theory of policy. The policies of both regimes are classified into two broad strategies, namely: first, the subjugation of Political Islam’s power (through two modes: a. violence and marginalization; and b. propaganda and image politics); second, the accommodation of Political Islam (through two modes: social and religious appeasement; and legislative policy appeasement). Those policies are significantly of similar style and aim but different in terms of order and tactic of implementation. In general, those policies are equally pragmatic and realistic for maximizing the regime’s strength and gains and outrivaling all powers of Political Islam with view of achieving the state’s political stability and avoiding the emergence of legitimacy crisis owing to domestic situations. Therefore, the researcher refers to such policies as hegemonic regime’s domestic political stability strategy.*

**Key words:** *policies, regime, political Islam.*

**Abstrak:** *Disertasi berjudul “Kebijakan Rezim Otoriter Terhadap Islam Politik: Studi Kasus Rezim Soeharto dan Anwar Sadat” ini berupaya untuk menjawab pertanyaan, “Apa kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap Islam Politik dan apakah persamaan dan perbedaan di antaranya, serta faktor apa yang melatarbelakanginya?” Disertasi ini merupakan kajian pustaka dengan data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif analitis berdasarkan teori kebijakan. Kebijakan politik kedua rezim diklasifikasikan ke dalam dua strategi besar, yaitu: strategi subjugasi kekuatan Islam Politik dan strategi akomodasi. Strategi pertama mencakup: a. modus kekerasan dan peminggiran; dan b. modus propaganda dan politik citra. Strategi kedua mencakup dua aspek, yakni: aspek sosial-keagamaan, dan aspek politik hukum. Kebijakan-kebijakan itu memiliki persamaan yang signifikan dalam pola dan tujuan tetapi berbeda dalam urutan dan taktik penerapan. Kebijakan-kebijakan itu secara umum adalah sama-sama pragmatis realistik untuk memaksimalkan kekuatan dan keuntungan rezim dan mengalahkan semua kekuatan institusi Islam Politik dengan tujuan mewujudkan stabilitas politik dan menghindari terjadinya krisis legitimasi akibat kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pola kebijakan-kebijakan itu sebagai hegemonic regime’s domestic political stability strategy (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis).*

**Kata Kunci:** *rezim, kebijakan, Islam politik.*

## PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam yang dominan di dunia Islam pasca penjajahan Barat dan terbentuknya negara-bangsa dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu, (1) Islam dan politik tidak dapat dipisahkan; (2) Islam dan politik dapat dipisahkan; dan (3) Islam dan politik memiliki hubungan yang bersifat substantivistik bukan legal-formalistik.<sup>1</sup> Ketiga kategori ini merupakan hasil dari perbedaan pendapat mengenai interpretasi sumber-sumber pokok agama Islam dan khazanah pemikiran Islam klasik mengenai hubungan negara dan agama.

Aktivisme kategori yang pertama dan yang ketiga disebut Islam Politik yang institusinya bisa bermacam-macam bentuk kekuatan politik seperti partai politik, organisasi sosial keagamaan, gerakan tidak formal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau bentuk masyarakat madani lainnya. Institusi-institusi<sup>2</sup> politik yang mengusung Islam sebagai dasar politik selalu berjuang untuk mendapat kekuasaan dan perjuangannya itu tidak lepas dari interaksi dengan pemerintahan yang berkuasa. Sejarah interaksi antara pemerintahan negara dengan institusi Islam politik merupakan bagian inti dari sejarah negara-negara Islam dan sudah banyak buku yang menulis tentang hal itu dengan pendekatan yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Dalam sejarah politik Indonesia dan Mesir secara umum dan sejarah hubungan pemerintahan negara dengan institusi Islam Politik secara khusus ternyata terdapat beberapa aspek persamaan sejak kedua negara itu berdiri menjadi negara-bangsa modern yang berbentuk republik. Dalam hubungan itu institusi Islam Politik selalu dianggap pesaing politik yang utama bagi pemerintahan dan selalu dicurigai sebagai ancaman stabilitas politik karena ingin merebut kekuasaan. Persamaan-persamaan dalam hubungan antara pemerintahan negara dan institusi Islam Politik tersebut jika dicermati dengan seksama secara komparatif-historis akan tampak bahwa hal itu bukan suatu kebetulan tetapi merupakan suatu fenomena yang patut dikaji untuk mengetahui sebab-sebabnya.

Tidak hanya kedua negara itu memiliki persamaan dalam hal sejarah hubungan pemerintahan negara dan institusi Islam Politik, tetapi terdapat beberapa hal lagi yang sama antara kedua negara tersebut, misalnya kedua negara tersebut sama-sama merupakan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam/ *Organization of Islamic Conference* = *OIC*) yang memiliki pengaruh kuat di kawasan masing-masing, yakni kawasan Asia Tenggara dan kawasan Timur Tengah<sup>4</sup> berkat lokasi geografis

---

<sup>1</sup>Bahtiar Effendy. "Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?" dalam pengantar buku *Gagalnya Islam Politik* oleh Olivier Roy, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF. Cet. 1. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. v; lihat juga Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 22-33.

<sup>2</sup>Istilah institusi sebagai istilah sosial berarti "sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan, dan disebut juga pranata atau perlembagaan. Lihat B.N. Marbun. *Kamus Politik*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 274; definisi lain dari institusi adalah "serangkaian norma yang mengatur tindakan orang-orang dalam proses interaksi sosial; dengan kata lain, institusi merupakan aspek-aspek dari struktur sistem sosial, contohnya otoritas yang merupakan serangkaian norma yang mengatur perilaku yang dianggap perlu agar perkumpulan masyarakat mencapai tujuan-tujuannya bersama-sama. Lihat *Encyclopedia Americana*, vol. 15. Connecticut: Grolier Inc., 1997), hlm. 227; lihat juga Robert E. Goodin and Hans Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science*. (Oxford: Oxford University Press, 1988), hlm. 145-146.

<sup>3</sup>Contohnya: Nazih N. Ayubi. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. (London: Routledge, 1991); John L. Esposito (ed.). *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*. (Oxford: Oxford University Press, 1987); Graham Fuller. *The Future of Political Islam*. (New York: Palgrave, 2003).

<sup>4</sup>Kawasan Timur Tengah – lazimnya menurut perspektif Barat- mencakup negara-negara di timur laut Afrika, pantai Laut Tengah bagian timur, dan kawasan jazirah Arab dan Teluk Persia. Istilah Timur Tengah kadang-kadang diperluas sehingga mencakup wilayah di sekitar negara-negara tersebut yang mayoritas beragama Islam atau yang mayoritas beretnis Arab. Lihat Don Peretz, *The Middle East Today*. (New York and Oxford: Oxford University Press, 1986), hlm. 2-3; lihat *Encyclopedia of Democracy*, hlm. 831; Arthur Goldschmidt Jr. *A Concise History of the Middle East*. 7<sup>th</sup> ed. (Colorado: Westview Press, 2002), hlm.. 1-10.

strategis masing-masing. Kedua negara memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di kawasan masing-masing dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang beraneka ragam faham atau orientasi termasuk faham tentang hubungan antara negara dan agama, respons terhadap demokrasi dan nasionalisme, dan respons terhadap modernisme Barat. Indonesia dan Mesir juga memiliki hubungan bilateral yang bersejarah dalam hampir seluruh bidang terutama bidang pendidikan, agama dan politik yang terbukti secara nyata dengan saling mendukung pada masa sulit, baik pada masa penjajahan asing maupun pada masa pasca-kemerdekaan.<sup>5</sup>

Ketertarikan para peneliti, sejarawan, politikus, dan orientalis pada kajian ilmiah mengenai institusi Islam Politik dimulai sejak berdirinya organisasi *Ikhwanul Muslimin* (IM) tahun 1928 di Mesir dan minat untuk mengkaji hal itu makin memuncak setelah peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dianggap oleh pemerintahan presiden George W. Bush sebagai aksi kelompok teroris Islam.<sup>6</sup> Sekali pun teori politik yang berdasarkan sejarah merupakan produk dari serangkaian kejadian sejarah tertentu, akan tetapi mempunyai nilai dalam waktu-waktu mendatang.<sup>7</sup> Pengalaman hubungan pemerintahan negara dengan institusi Islam Politik di Indonesia dan Mesir layak untuk dijadikan

contoh mengenai hubungan Islam dan negara-bangsa yang pluralis pada masa kini, yakni mulai pertengahan abad kedupuluh.

Sejarah modern Indonesia dan Mesir memperlihatkan bahwa pelbagai strategi kebijakan terhadap institusi Islam Politik telah dilaksanakan oleh rezim yang berkuasa di masing-masing negara. Masa pemerintahan presiden Soeharto yang dikenal dengan sebutan rezim Orde Baru di Indonesia (1968-1998) dan masa pemerintahan Anwar Sadat di Mesir (1970-1981) termasuk masa yang krusial dalam hal hubungan rezim yang berkuasa dengan institusi Islam Politik. Kedua presiden yang berkuasa dalam satu masa itu sama-sama memperlakukan kekuatan institusi Islam Politik dengan pelbagai strategi dan kebijakan demi memperoleh legitimasi<sup>8</sup> yang diperlukan untuk stabilitas politik dan untuk menjamin hegemoni rezimnya. Masa pemerintahan kedua presiden tersebut merupakan masa pemerintahan yang politiknya meninggalkan pengaruh yang kuat dan membekas terhadap masa pemerintahan berikutnya dalam masing-masing negara, sehingga boleh dikatakan bahwa masa pemerintahan kedua presiden tersebut merupakan babak sejarah yang sangat berpengaruh dalam sejarah modern kedua negara itu.<sup>9</sup>

Namun, ada satu hal yang unik, yaitu bahwa di Mesir pada masa rezim presiden Sadat tidak ada suatu kekuatan pun dari institusi Islam Politik yang secara resmi diakui oleh

---

<sup>5</sup>A.M. Fachir (ed.), *Potret Hubungan Indonesia Mesir*. Cet.1. (Cairo: KBRI, 2009), hlm. 1.

<sup>6</sup>David H. Dunn, "US Foreign Policy under George W. Bush: The Implications of 11 September and the War in Iraq", dalam *Regional Surveys of the World: The USA and Canada 2004*, 6<sup>th</sup> ed. (London and New York: Europa Publications, Taylor & Francis Group, 2004), hlm. 68.

<sup>7</sup>S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. Cet.5. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 149

<sup>8</sup>Legitimasi berarti "pengakuan para warga negara bahwa pemerintahan yang berkuasa berhak untuk ditaati dan menjalankan kekuasaannya yang bersifat mengikat dan memaksa". Andrew Heywood, *Politics*. (New York: Palgrave, 2002), hlm. 210.

<sup>9</sup>Sebagai contoh saja, Presiden Sadat pada tahun 1979 telah berhasil mengamendemen UUD Mesir 1971 sehingga jumlah masa jabatan presiden tidak lagi terbatas dengan dua kali saja dengan durasi 6 tahun masing-masing, dan berdasarkan amendemen itu presiden berikutnya, yakni Hosni Mubarak, berhasil menjabat 5 kali. Di Indonesia, presiden Soeharto berhasil melarang faham dan politik komunisme di Indonesia dan menjadikan Pancasila wajib diterima oleh semua golongan di Indonesia.

negara sebagai partai politik atau organisasi masyarakat formal yang memiliki sayap politik meskipun secara *de facto* kegiatan-kegiatannya tidak dibekukan oleh negara. Hal ini berbeda dengan keadaan kekuatan institusi Islam Politik di Indonesia pada masa rezim presiden Soeharto di mana negara telah mengakui sebagian kekuatan institusi Islam Politik sebagai partai politik seperti NU, Parmusi, PSII, Perti (yang kemudian digabungkan dalam PPP). Pertanyaan yang muncul akibat perbedaan itu adalah: apakah kebijakan-kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam yang berlainan bentuk di negara masing-masing itu komparabel atau tidak komparabel? Apakah persamaan dan perbedaan dalam kebijakan-kebijakan kedua rezim terhadap kekuatan institusi Islam Politik merupakan suatu kebetulan atau merupakan fakta yang dapat diteliti berdasarkan kondisi dalam negeri dan rasionalitas pengambilan keputusan?

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti memilih tema yang berjudul “Kebijakan Rezim Otoriter terhadap Islam Politik : Studi Kasus Rezim Soeharto dan Anwar Sadat” untuk dijadikan bahan penelitian komparatif dalam disiplin ilmu politik dunia Islam modern, dengan harapan bahwa hasil kajian komparatif ini dapat menjadi contoh representatif mengenai posisi institusi Islam Politik dan hubungannya dengan pemerintahan rezim yang berkuasa di negara pluralis mayoritas Muslim.<sup>10</sup>

Hal lain yang juga mendorong peneliti untuk memilih judul ini adalah bahwa masalah yang diangkat, yaitu perbandingan antara kebijakan-kebijakan rezim presiden Soeharto dan presiden Sadat terhadap institusi Islam

Politik masih belum diuraikan secara lengkap dalam berbagai literatur atau penelitian yang ada selama ini. Adapun literatur-literatur atau penelitian-penelitian tersebut hanya membahas hubungan negara dengan Islam secara umum tanpa memfokuskan perbandingan antara kebijakan-kebijakan rezim presiden Soeharto dan presiden Sadat terhadap institusi Islam Politik.

Dalam penelitian ini istilah Islam Politik akan mencakup semua institusi yang mempunyai orientasi politik untuk mengusung Islam sebagai asas negara, baik sebagai institusi formal maupun tidak formal. Institusi formal adalah yang secara resmi diakui keberadaannya oleh pemerintahan dan undang-undang negara, baik yang berupa partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun berupa organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki sayap politik atau merupakan kekuatan politik yang signifikan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Institusi yang tidak formal adalah organisasi atau gerakan Islam yang secara resmi tidak diakui keberadaannya oleh pemerintahan dan undang-undang negara seperti organisasi *Ikhwanul Muslimin* (IM) di Mesir pada masa presiden Anwar Sadat, Hizbut-Tahrir di Indonesia pada masa presiden Soeharto, dan lain-lain.

Menurut peneliti, apapun bentuk institusi Islam Politik, kekuatan potensialnya atau partisipasi politiknya sebagai pesaing politik tetap dikhawatirkan oleh rezim yang berkuasa karena akan dapat mempengaruhi sistem politik. Oleh karena itu, rezim menghadapi semua dengan strategi dan taktik<sup>11</sup> kebijakan yang hampir sama untuk melemahkan

---

<sup>10</sup>Ada banyak karya ilmiah yang berisikan perbandingan antara gerakan-gerakan revivalisme Islam terutama Islam Politik di dunia Islam, di antaranya James P. Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Barbara F. Stowasser. *The Islamic Impulse*. (London: Croom Helm, 1987); Martin E. Marty & R. Scott Appleby (eds.), *Fundamentalism Observed*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1991); Ruedy John (ed.), *Islamism and Secularism in North Africa*. (New York: St. Martin's Press, 1996).

<sup>11</sup>Strategi adalah rancangan menyeluruh untuk merespons situasi konflik tertentu, sedangkan taktik adalah aksi nyata dan spesifik yang mengarahkan konflik sesuai dengan strategi. R.S. Lulofs and D.D. Cahn, *onflict: From Theory to Action*. (MA: Allen and Bacon, 2000), hlm. 100.

kekuatannya. Berdasarkan itulah peneliti melihat bahwa kebijakan rezim Soeharto dan Sadat terhadap institusi Islam Politik adalah komparabel meskipun di Mesir institusi Islam Politik belum pernah secara resmi diakui sebagai partai politik sejak pemerintahan Gamal Abdel Nasser melarang organisasi *Ikhwanul Muslimin* dan sayap politiknya. Penelitian ini lebih menitikberatkan analisis kebijakan politik rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik daripada analisis reaksi atau perilaku politik institusi Islam Politik di Indonesia dan Mesir terhadap kebijakan kedua rezim tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) kebijakan apa yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat dalam menghadapi kekuatan institusi Islam Politik di negaranya masing-masing?, dan (2) apa persamaan dan perbedaan antara kebijakan-kebijakan kedua rezim tersebut, dan faktor-faktor apakah yang ada di balik persamaan dan perbedaan tersebut? Sedangkan tujuan penelitian adalah (1) mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik berdasarkan strategi dan modusnya, dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampaknya terhadap kekuatan institusi Islam Politik, dan (2) mencari titik-titik persamaan dan perbedaan antara kebijakan-kebijakan kedua rezim itu dalam hal strategi serta urutan intensitas masing-masing strategi guna mengetahui apakah kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi oleh formal-tidaknya institusi Islam Politik yang merupakan pesaing rezim.

Kegunaan penelitian atau *significance of research* secara ontologis adalah memberikan deskripsi baru tentang hubungan antara rezim yang berkuasa di Indonesia dan Mesir dengan institusi Islam Politik pada era Soeharto dan era Anwar Sadat dengan menjelaskan strategi kebijakan rezim yang berkuasa, tujuan, dan

dampaknya. Secara epistemologis adalah memberi sudut pandang baru tentang persamaan dan perbedaan kebijakan rezim yang berkuasa di negara pluralis mayoritas Muslim terhadap institusi Islam Politik berdasarkan konteks dalam negeri dan rasionalitas pengambilan keputusan; memperkaya khazanah ilmu politik terutama ilmu politik Islam komparatif dan psikologi politik dalam hal relasi negara dengan institusi Islam Politik di negara pluralis mayoritas muslim. Secara aksiologis adalah menjadi rujukan sejarah politik yang berguna bagi para pengamat, peneliti, mahasiswa dan sejarawan politik dunia Islam tentang interpretasi urutan intensitas strategi kebijakan rezim yang berkuasa terhadap institusi Islam Politik di Indonesia dan Mesir; menjadi bahan refleksi sejarah politik bagi aktivis Islam Politik serta para penguasa di negara-negara mayoritas Muslim agar menghindari kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi dalam interaksi rezim yang berkuasa dengan institusi Islam Politik; memicu semangat para peneliti politik dunia Islam agar mencari dimensi-dimensi komparatif interpretatif baru dalam hubungan antara negara dan Islam Politik di dunia Islam terutama negara-negara majemuk yang bermayoritas Muslim.

Untuk membedah problem akademik di atas dibutuhkan tiga kerangka teoritik, yakni rezim, kebijakan, dan Islam politik. *Pertama*, rezim merupakan sistem politik pemerintahan yang tidak hanya mencakup mekanisme pemerintahan dan institusi-institusi negara tetapi juga struktur dan proses interaksinya dengan masyarakat luas terkait distribusi kekuasaan, kekayaan dan sumber-sumber. Oleh karena itu suatu rezim dapat disifati atau dikarakterisasi dengan pola pemerintahan atau pengaturan kehidupan ekonominya. Ada dua bentuk rezim: rezim domestik dan rezim internasional. Rezim domestik merupakan norma sistem politik di mana pemerintahan yang berkuasa dapat mengontrol seluruh proses komunikasi politik

agar seluruh peraturan, prosedur, dan prinsip pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan kehendak pemerintahan. Rezim domestik dapat diidentifikasi dengan kepala pemerintahan yang berkuasa, contohnya rezim Soeharto, rezim Sadat, rezim Saddam, dan sebagainya. Sedangkan rezim internasional merupakan prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang mengarah bidang isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Istilah rezim – pada umumnya- digunakan untuk sebutan bagi pemerintahan yang bersifat otoriter, yakni di mana lembaga eksekutif negara dapat mengontrol lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terutama berkat loyalitas partai dominan dan militer. Pemusatan kekuasaan dalam lembaga eksekutif dapat disebabkan oleh situasi-situasi seperti: perang melawan negara lain; pemberontakan dalam negeri; depresi ekonomi; atau bencana alam.

Ketika kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam kancah politik nasional dikuasai oleh *Power* (kekuasaan)<sup>12</sup> rezim yang berkuasa, baik secara persuasif, negosiatoris, maupun koersif, maka rezim tersebut disebut rezim hegemonis hingga semua peraturan pengambilan keputusan akan didominasi oleh pihak rezim. Alasan realistik utama di balik hegemoni rezim adalah menjaga stabilitas dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan anarki. Peneliti menyebut stabilitas tersebut “stabilitas rezim hegemonis”. Untuk tujuan stabilitas itu, rezim mengendalikan komunikasi politik (jaringan *input* dan *output* sistem politik). Rezim Soeharto dan Anwar Sadat mengendalikan komunikasi politik – secara umum- ala gelang karet, yakni diperketat pada masa

ancaman krisis politik dan dilonggarkan bilamana krisis itu pulih dan kehidupan politik makin stabil dan tenang.

Setiap rezim yang memiliki otoritas atau legitimasi lazimnya mengusung suatu ideologi sebagai landasan sistem politik dan ekonomi. Ideologi yang diusung oleh rezim Soeharto adalah Demokrasi Pancasila dengan ekonomi pembangunan yang liberal; sedangkan ideologi yang diusung rezim Sadat adalah Nasionalisme Mesir (*Al-Wathaniyah Al-Mishriyah* (الوطنية المصرية) sebagai pengganti ideologi Pan-Arabisme (*Al-Qawmiyah Al-'Arabiyyah* (القومية العربية) yang diusung oleh presiden Gamal Abdel Nasser, dan sistem ekonomi yang diadopsi adalah sistem ekonomi liberal yang didasarkan pada kebijakan *infithah* (*open-door policy*). Untuk itu, kedua rezim selalu berupaya untuk mempromosikan budaya politik (*political culture*)<sup>13</sup> dan juga opini publik (*public opinion*) yang mendukung ideologi politik dan ekonominya serta kebijakan-kebijakannya terhadap institusi Islam Politik.

*Kedua*, kebijakan. Dalam sistem politik, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin politik sesuai dengan tujuan-tujuan dan nilainya setelah mempertimbangkan beberapa alternatif rencana dan sarana-sarana politik dan non-politik dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus berdasarkan penilaiannya terhadap tingkat kepentingan dan kelayakan. Kebijakan (*policy*) menurut James E. Anderson, adalah “alur tindakan yang purposif (berencana) yang diikuti oleh aktor satu atau banyak dalam menangani sebuah masalah atau hal yang penting”.<sup>14</sup> Adapun menurut Heywood, kebijakan (*policy*)

---

<sup>12</sup>*Power* adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengutamakan pilihannya atas pilihan-pilihan dari pihak lain. Susan Strange, *The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy*. (Cambridge University Press, 1996), hlm. 17

<sup>13</sup>Budaya politik adalah orientasi psikologis rakyat terhadap objek-objek politik seperti partai-partai, pemerintahan, dan konstitusi yang diungkapkan melalui sikap-sikap politik, keyakinan-keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai mereka. Heywood, *Politics...*, hlm. 219

<sup>14</sup>James E. Anderson, *Public Policy Making*. (New York: Praeger Publishers, 1976), hlm. 3

merupakan hubungan antara rencana atau niat (yakni apa yang pemerintah menyatakan akan dilakukannya), tindakan (yakni yang dilakukan oleh pemerintah) dan hasil (yakni dampak terhadap masyarakat luas).<sup>15</sup>

Kebijakan atau keputusan politik yang diambil oleh aktor politik dapat mencerminkan rasionalitas aktor, strategi jangka panjang atau pendeknya, latar belakang organisasi birokrasinya, dan karakternya.<sup>16</sup> Rasionalitas kebijakan-kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik tampak dalam tujuannya masing-masing untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya krisis legitimasi kekuasaan akibat kondisi dalam negeri. Latar belakang militer masing-masing tampak dalam upayanya yang berhasil melemahkan oposisi. Urutan dan taktik penerapan kebijakan rezim Soeharto yang mana kebijakan subjugasi mendahului kebijakan akomodasi mencerminkan pengalaman militer panjang Soeharto yang membuatnya selalu berhadapan dengan gerakan-gerakan pemberontakan seperti DI/TII; sedangkan kebijakan Sadat yang mulai dengan akomodasi baru subjugasi mencerminkan hubungan baiknya dulu dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin* sebelum revolusi 1952 dan juga latar belakang karimnya sebagai politisi dan penulis.

Ada dua strategi utama yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik, yaitu strategi subjugasi dan strategi akomodasi. Subjugasi merupakan salah satu bentuk strategi pertikaian dalam konflik kepentingan yang digunakan sebagai solusi kompetitif-distributif (*competitive-distributive strategy*). Tujuan dari strategi konfrontasional

ini adalah melemahkan, mengalahkan, dan memaksimalkan keuntungan dari pihak lawan atau pesaing. Strategi ini termasuk *zero-sum game* yang hasilnya bersifat *win-lose* bukan *win-win*.<sup>17</sup> Kekerasan adalah salah satu wujud dari konfrontasi subjugatoris terhadap oposisi politik dengan cara intimidasi, koersi, represi (kekerasan proaktif), dan supresi (kekerasan reaktif), penekanan, penindasan, pengawasan yang ketat. Rezim represif mempertahankan kekuasaannya dengan menjauhkan massa dari perpolitikan dan tidak memberikan mereka kebebasan berekspresi, baik dengan cara politis seperti pelemahan atau pembubaran sarana perwakilan politik (seperti partai, pemilu, serikat buruh, pers yang bebas, dll.) atau dengan cara psikologis (seperti penebaran rasa takut).<sup>18</sup>

Sebaliknya, akomodasi merupakan strategi penanganan konflik kepentingan bersifat kolaboratif-integratif di mana pihak-pihak yang terlibat memilih untuk bekerjasama sebagai opsi kompromi resiprokal yang memuaskan keinginan dan cita-cita masing-masing pihak sebagai solusi *win-win*. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghindari konfrontasi yang tidak menguntungkan masing-masing pihak.<sup>19</sup> Rasionalitas kebijakan-kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik tampak dalam tujuannya masing-masing untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya krisis legitimasi kekuasaan akibat kondisi dalam negeri. Latar belakang militer masing-masing tampak dalam upayanya yang berhasil melemahkan oposisi.

Setelah pemerintahan Soeharto dan pemerintahan Sadat berhasil mencapai konso-

---

<sup>15</sup>Heywood, *Politics...*, hlm. 400

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 400-403. Lihat Hagopian. *Regimes...*, hlm. 112-114; Ho-Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. (London: SAGE, 2008), hlm. 27; lihat juga Amitai Etzioni, *Mixed Scanning: A Third Approach to Decision-Making*. Public Administration Review. Vol. 27, hlm. 385-389; dan Amitai Etzioni, *The Active Society*. (New York: Free Press, 1968), hlm. 289

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm..31-33

<sup>18</sup>Heywood, *Politics...*, hlm. 387

lidasi kekuatan sistem politik, keduanya berkembang sehingga menjadi otoriter dan hegemonis demi menjamin stabilitas politik, menghindari potensi terjadinya krisis dengan melegitimasi kekuasaan, dan mensubordinasikan kekuatan-kekuatan politik saingannya termasuk institusi Islam Politik. Oleh karena itu, Peneliti merumuskan pola kebijakan-kebijakan itu sebagai *hegemonic regime's domestic political stability strategy* (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis). Stabilitas politik dianggap sebagai landasan utama bagi pembangunan ekonomi, kemajuan dalam segala bidang, dan kedamaian serta keamanan dalam negeri.

*Ketiga*, Islam politik. Politik Islam dapat didefinisikan sebagai teori politik dalam pandangan Islam, yaitu simbol-simbol dan nash-nash dari agama Islam yang berkisar pada ketertiban sosial, kekuasaan dan otoritas. Dengan kata lain, Politik Islam merupakan bentuk politik identitas yang memandang Islam sebagai *din* dan *daulah* (agama dan negara). Sedangkan Islam Politik adalah institusi politik yang orientasinya adalah mengusung Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan sistem politik negara dan berjuang untuk menerapkan syariat Islam dalam negara-negara bermayoritas Muslim atau mewujudkan sebuah negara Islam secara legal-formal maupun secara substansial berdasarkan interpretasi terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan sejarah

Khilafah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan itu, label Islam Politik mencakup semua kekuatan-kekuatan politik yang memiliki orientasi dan upaya agar agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik negara dan kehidupan masyarakat, bahkan tidak dipisahkan dari sistem politik di seluruh dunia Islam (negara-negara bermayoritas Muslim).<sup>20</sup>

Revivalisme Islam modern tidak hanya ditandai dengan aktivisme Islam Politik tetapi juga kegiatan-kegiatan sosialisasi norma-norma Islam dalam semua pranata sosial negara.<sup>21</sup> Corak Islam itu disebut Islam kultural, Islam sipil atau Islam substantivistik dan dikontraskan dengan Islam politik yang bersifat legal-formalistik atau fundamentalis atau radikal (garis keras) baik yang bergerak secara struktural dalam sistem politik sebagai partai politik maupun yang berjuang di luar sistem politik.<sup>22</sup>

Persamaan dan perbedaan antara institusi Islam Politik di Indonesia pada era Soeharto dan di Mesir pada era Sadat dapat dilihat dalam tabel 1.

Untuk menjaga keaslian penelitian harus melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah, yakni:

*Pertama*, disertasi M. Amien Rais yang berjudul "*The Muslim Brotherhood in Egypt: Its Rise, Demise and Resurgence: Socio-Political and Historical Approach*"<sup>23</sup>. Disertasi

---

<sup>19</sup>Ho-Won Jeong, *Understanding Conflict...*, hlm. 33

<sup>20</sup>Youssef Choueir, "Islam and Fundamentalism" dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (eds.) "*Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*", versi Indonesia. (Jakarta: MediaTOR, 2003), hlm. 297.

<sup>21</sup>Aktivisme Islam dapat dipicu oleh beberapa alasan, (1) sebagai simbol oposisi atau protes terhadap kegagalan pemerintah dalam memenuhi harapannya, (2) sebagai reaksi terhadap terjadinya krisis identitas. R. Hrair Dekmejian, "*Islamic Revival: Catalysts, Categories and Consequences*" in Shireen T. Hunter (ed.), *The Politics of Islamic Revivalism*. (Bloomington: Indiana University Press, 1988), hlm. 7; Saad Eddin Ibrahim, "*Egypt's Islamic Activism in 1980's*" in *Third World Quarterly*, vo. 10, no. 2, (April 1988), hlm. 632

<sup>22</sup>Sistem politik adalah seperangkat proses dan institusi yang mengatur konflik yang potensial meletus akibat persaingan untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kekurangan-kekurangan manusia. Lihat Hagopian, *Regimes...*, hlm. 8.

<sup>23</sup>Artinya "*Ikhwanul Muslimin di Mesir: Munculnya, Surutnya dan Kebangkitannya: Pendekatan Sosio-Politik dan Sejarah*". Disertasi ini dilakukan di Universitas Chicago, Amerika Serikat, tahun 1980.

Tabel 1  
Perbandingan Institusi Islam Politik Indonesia dan Mesir

Indonesia	Mesir
<p><b>a. Kategori Pertama:</b> organisasi formal sebagai partai politik atau sayap politik suatu organisasi masyarakat (seperti: NU, Parmusi, PSII, Perti (yang kemudian digabungkan dalam PPP). Kategori ini tidak memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam substantivistik dan memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p> <p><b>b. Kategori Kedua:</b> organisasi tidak formal dan terlarang ataupun ditolerir (seperti: HTI dan DI/NII). Kategori ini memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam legal-formalistik tanpa memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p>	<p><b>a. Kategori Pertama:</b> organisasi tidak formal yang memiliki sayap politik yang ditolerir oleh negara meskipun tidak diakui secara resmi (yakni: <i>Ikhwanul Muslimin</i>). Kategori ini tidak memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam substantivistik dan memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p> <p><b>b. Kategori Kedua:</b> organisasi terlarang dan tidak ditolerir karena dianggap gerakan garis keras (seperti: <i>Al-Jama'ah Al-Islamiyah</i>, <i>Jamaah at-Takfir wal Hijrah</i> dan <i>Jama'ah Al-Jihad</i>). Kategori ini memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam legal-formalistik tanpa memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p>

itu ditulis sebelum berakhirnya rezim Orde Baru dan Anwar Sadat. Disertasi tersebut membahas pengaruh gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimin* di Mesir terutama pada era Sadat.<sup>24</sup> Gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimin* pada era Sadat dilihat dari aspek reaksinya dan pengaruhnya terhadap politik Sadat dan juga pengaruhnya di luar Mesir. Kesimpulan dari disertasi tersebut adalah bahwa gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimin* berhasil mencegah sekularisme mutlak di negara-negara mayoritas Muslim, bahkan ironisnya pengaruhnya lebih berhasil di negara Iran yang mayoritasnya bermadzhab Syi'ah sehingga negara tersebut menjadi negara

berasaskan agama Islam setelah revolusi Khomeini. Tidak terdapat fokus khusus pada perbandingan antara kebijakan-kebijakan rezim presiden Soeharto dan presiden Sadat terhadap institusi Islam Politik.

*Kedua*, buku Louay Abdulbaki dengan judul "*Democratization and Islamic Political Activism in Muslim Countries: Egypt and Indonesia*".<sup>25</sup> Buku ini merupakan studi kasus. Penulis membandingkan tingkat keberhasilan Islam Politik dalam sistem demokrasi dan proses demokratisasi di Mesir dan Indonesia. Dia memfokuskan studinya pada era pasca Orde Baru dan Era Mubarak pasca tahun

<sup>24</sup>Disertasi yang terkenal tentang gerakan *Ikhwanul Muslimin* sebelum era Sadat adalah disertasi studi lapangan yang ditulis oleh Richard P. Mitchell di Princeton University tahun 1960 dan diterbitkan dalam buku dengan judul "*The Society of Muslim Brothers*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdussalam Ridhwan dan diterbitkan pertama kali oleh Maktabah Madbuli, Cairo, Mesir tahun 1977 dengan judul "*Al-Ikhwanul Muslimun*".

<sup>25</sup> Diterbitkan oleh VDM Verlag, Jerman, 2010.

2000. Dia berkesimpulan bahwa Islam Politik Indonesia lebih berhasil daripada Islam Politik Mesir dalam proses demokratisasi dan juga dalam hal meraih dukungan massa. Menurut peneliti, similaritas keadaan aktivisme Islam Politik di Indonesia (era Soeharto) dan Mesir (era Sadat) lebih tampak daripada keadaannya di era Reformasi (di Indonesia) dan era Hosni Mubarak (di Mesir). Oleh karena itu, analisis kebijakan Soeharto dan Sadat terhadap institusi Islam Politik dalam disertasi ini akan memberikan kesimpulan yang reliabel berkat tingkat komparabilitasnya yang cukup tinggi.

*Ketiga*, Buku M. Rusli Karim yang berjudul “*Negara dan Peminggiran Islam Politik*”<sup>26</sup>. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari kebijakan pembangunan rezim Orde Baru terhadap Islam Politik era 1970-an dan 1980-an. Kajian ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh rezim tersebut dan dengan kepemimpinan yang didominasi oleh ABRI *abangan*, peminggiran Islam Politik tidak mungkin dielakkan. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan ditambah dengan wawancara dengan beberapa orang tokoh yang terlibat dalam pembentukan Orde Baru di Indonesia. Peminggiran Islam ialah keadaan yang membuat Islam politik tidak berfungsi, seperti sedikitnya kelompok Muslim santri yang menduduki pemerintahan, kecilnya partai Islam dan kurang terartikulasikannya kepentingan Islam. Kebijakan-kebijakan yang meminggirkan Islam adalah: “*birokratisasi, militarisasi, jawanisasi/nativisasi, departi-sasi dan deideologisasi*”.

Di samping itu, ada faktor tidak langsung seperti sejarah masa lalu, tekanan dari Barat, dominasi kelompok Kristen dalam “*ruling elite*”, anggapan yang salah tentang Islam serta ketidaksiapan kelompok Islam sendiri.

Sedangkan faktor peminggiran yang non-politik adalah kegiatan “*kristenisasi*”. Kajian ini menemukan bahwa rezim Orde Baru sesungguhnya telah didominasi oleh ABRI *abangan*, tokoh penganut aliran kepercayaan, nasionalis-sosialis sekular dan kelompok Kristen.

Marginalisasi “*Islam Politik*” benar-benar terbukti tetapi terdapat tiga reaksi positif kelompok Islam, yakni: adanya Partai Persatuan Pembangunan (perjuangan ini tidak berhasil), pembaruan pemikiran Islam, dan interaksi Islam dengan Pancasila. Kedua corak reaksi terakhir ini ternyata mempunyai dampak positif bagi Islam. Faktor inilah yang memperkuat posisi Islam. Bersamaan dengan perpecahan di dalam “*ruling elite*” pada tahun 1988, posisi Islam di Kabinet semakin membaik. Ini menandakan awal adanya akomodasi terhadap Islam. Berdirinya ICMI, pemilu 1992 dan pembentukan Kabinet tahun 1993, menunjukkan bahwa kepentingan Islam sebenarnya telah diakomodasikan oleh rezim.

Kajian itu masih kurang dalam menguraikan klasifikasi kebijakan rezim Orde Baru terhadap Islam Politik dan juga kurang menunjukkan faktor luar negeri yang dapat memberikan rasionalitas kepada pola kebijakan yang diambil. Lebih dari itu, disertasi tersebut tidak memperkuat temuan-temuannya dengan perbandingan terhadap rezim-rezim yang lain di dunia Islam. Oleh karena itu, kehadiran penelitian ini merupakan kontribusi yang diperlukan sebagai penyempurnaan dari hasil disertasi tersebut.

*Keempat*, disertasi Joko Mirwan Muslimin yang berjudul “*Islamic Law and Social Change: A Comparative Study of the Institutionalization and Codification of Islamic Family Law in the nation-states Egypt and Indonesia*”<sup>27</sup>. Disertasi ini mencakup:

---

<sup>26</sup> Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Tiara Wacana Yogya di Yogyakarta tahun 1999.

<sup>27</sup> Artinya “*Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Suatu Studi Komparatif mengenai Institusionalisasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga di Negara Mesir dan Indonesia*”. Studi ini dilakukan di Universitas Hamburg, Jerman, tahun 2005.

identifikasi sejarah hukum Islam, cara pikir para ahli hukum Islam, serta pengaruh dinamika perubahan sosio-struktural negara kesatuan Mesir dan Indonesia terhadap proses institusionalisasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam. Metodenya adalah metode historis komparatif hukum Islam untuk menggambarkan respon sosial politik dari masyarakat dan pemerintah kedua negara terhadap isu-isu Islam terutama hukum keluarga dan pola reinterpretasi hukum keluarga klasik agar sesuai dengan konteks kekinian. Disimpulkan bahwa beberapa undang-undang yang khusus masyarakat Islam kurang memperhatikan dasar kemajemukan negara. Disertasi tersebut hanya menyentuh satu aspek saja dari penelitian ini yaitu pola politik hukum yang diambil oleh rezim Soeharto dan Sadat, tetapi tidak memberi fokus pada tema pokok dari penelitian disertasi ini yaitu perbandingan antara kebijakan-kebijakan rezim presiden Soeharto dan presiden Sadat terhadap institusi Islam Politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan salah satu metode ilmu perbandingan politik (*comparative politics*) yaitu studi kasus representatif dengan data kualitatif yang didukung juga oleh data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif analitis. Sebagai kajian kepustakaan, data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yakni dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen sejarah, jurnal, surat kabar dan juga website-website internet, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis lalu diambil

kesimpulannya secara induktif berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini. Metode komparatif ini digunakan untuk menemukan variabel-variabel yang dianggap dapat menafsirkan persamaan dan perbedaan dalam kebijakan-kebijakan antara rezim presiden Soeharto dan rezim presiden Sadat terhadap institusi Islam Politik sebagai kasus representatif dari kebijakan rezim otoriter terhadap institusi Islam Politik di negara pluralis yang mayoritasnya beragama Islam. Diharapkan bahwa studi kasus ini dapat memberi kontribusi untuk pengembangan kerangka teori atau kajian yang lebih luas yang menyangkut tema penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Kedua Rezim**

Butir-butir contoh strategi kebijakan yang disebut dalam penelitian ini adalah hanya sampel representatif bukan eksklusif. Berdasarkan teori faktor, pentingnya mengetahui tingkat persamaan dan perbedaan antara kebijakan kedua rezim itu adalah karena dapat dibandingkan dengan tingkat persamaan dan perbedaan faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang lazimnya melatarbelakangi pengambilan keputusan terutama kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, persamaan dan perbedaan kebijakan kedua rezim terhadap Islam Politik dapat dikatakan mencerminkan persamaan dan perbedaan kondisi dalam negeri, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

## Persamaan &amp; Perbedaan Kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap Politik Islam

Kebijakan	Rezim Soeharto	Rezim Sadat	Keterangan
<b>A. Strategi Subjugasi</b>			
1. Modus Kekerasan dan Peminggiran	<p>a. Penolakan rehabilitasi Masyumi 1967 dan proposal pendirian PDII yang diajukan M. Hatta (1967).</p> <p>b. Campur tangan penentuan Djarnawi Hadikusumo sebagai ketum pertama Parmusi (1968), dan penentuan para ketum PPP (1973-1998).</p> <p>c. Penolakan masuknya Piagam Jakarta dalam pembukaan UUD 1945 pada tahun 1968.</p> <p>d. memperkukuh dwifungsi ABRI untuk mendukung Golkar (1969)</p> <p>e. Kecurangan dalam memenangkan pemilu dengan manipulasi dan intimidasi dan penangkapan kyai-kyai NU (1971 dan 1977) serta kebijakan monoloyalitas PNS kepada Golkar, (1970).</p> <p>f. Birokrasi dikuasai oleh militer dan sedikitnya aktivis Islam dalam keempat kabinet pertama.</p> <p>g. Supresi terhadap aktivisme Islam pasca terjadinya peristiwa konflik, terorisme, atau demonstrasi besar, seperti peristiwa MALARI (1974), Peristiwa Lapangan Banteng (1982), Peristiwa Tanjung Priok (1984), peristiwa Lampung (1989), dll.</p> <p>h. Fusi Partai (1975) dan Asas Tunggal (1985); dan membatasi kepengurusan Parpol sampai tingkat Dati II, dan mencabut sifat oposisi dari Parpol (1975).</p> <p>i. NKK/BKK (1978/1979) dan Penetapan P4 (1978), Pelarangan jilbab bagi siswi Islam di tingkat pendidikan menengah, dan membatasi aktivitas masjid kampus, (1982).</p> <p>j. Aparat keamanan dan intelejen diintensifkan untuk pengawasan yang ketat dan tindakan represif terhadap aktivis Islam Politik legal-formalistik, mulai awal rezim; memperketat pengawasan dan perizinan terhadap seminar-seminar politik Islam. (1970-an dan 1980-an)</p>	<p>a. IM dilarang untuk mendirikan partai politik berbasis Islam.</p> <p>b. Kecurangan dalam memenangkan pemilu dengan manipulasi dan intimidasi (1979).</p> <p>c. Supresi terhadap kelompok Islam Politik setelah peristiwa konflik, terorisme atau demonstrasi besar, seperti Peristiwa <i>Al-Khankah</i> (1972), demonstrasi mahasiswa (1972), Demonstrasi Roti (1977), dan Peristiwa <i>Az-Zawyah Al-Hamra</i> 1981.</p> <p>d. Aparat keamanan dan intelejen diintensifkan untuk pengawasan yang ketat dan tindakan represif terhadap aktivis Islam Politik, terutama pasca Demonstrasi Roti (1977).</p> <p>e. Banyak masjid-masjid yang dinegerikan, dan urusan agama dijadikan hak prerogatif Kementrian Wakaf dan Al-Azhar. Imam-imam masjid yang rajin mengkritik kebijakan rezim, dipindahkan, dipecat, ataupun dipenjara.</p> <p>f. Minimnya jumlah elemen Islam Politik dalam parlemen, kabinet, dan jabatan-jabatan tinggi dalam birokrasi dan militer.</p> <p>g. Pencabutan izin terbit pers kelompok Politik Islam (IM) yang berani mengkritik kebijakan rezim (terutama mulai 1980).</p> <p>h. Penangkapan banyak tokoh-tokoh dan aktivis Islam Politik (termasuk IM) (1981).</p>	<p><b>a. Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat persamaan signifikan</li> <li>2. Kedua rezim tidak menggunakan modus kekerasan pada masa peralihan dari sistem rezim yang sebelumnya tetapi setelah masa konsolidasi.</li> <li>3. Kebijakan kekerasan dijustifikasi dengan alasan menjaga stabilitas, pembangunan, perdamaian dan kesa-tuan negara, terutama setelah terjadinya peristiwa konflik, terorisme atau demonstrasi besar.</li> <li>4. Kebijakan kekerasan dan pemburukcitraan ditujukan secara khusus kepada aktivis Islam Politik Legal-Formalistik/ garis keras, dan kebijakan ini berhasil memenangkan partai yang berkuasa lawan kelompok Islam Politik.</li> </ol> <p><b>b. Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sadat mengintensifkan kebijakan subjugasi pada akhir masa rezimnya, sedangkan Soeharto sebaliknya.</li> </ol>

2. Modus Propaganda dan Politik Citra	<p>a. Rezim berupaya untuk menanamkan budaya politik yang memandang bahwa negara akan dalam bahaya jika kelompok Islam Politik atau Komunis mengambil kekuasaan. (1960-an–1990-an).</p> <p>b. Rezim berupaya menyaingi dan membayangi kinerja sosial-keagamaan dari kelompok Islam Politik dengan mendirikan lembaga-lembaga serupa di bawah naungan pemerintahan, seperti YAMP, GUPPI, Dharma Wanita, dll., tahun (1970-an-1990-an)</p> <p>b. Media rezim menyorot simbol-simbol dan retorika keislaman Presiden Soeharto seperti ibadah haji (1991) dan juga dukungannya kepada beberapa kegiatan dakwah.</p> <p>c. Indonesia berperan aktif dalam OKI (1990-an)</p> <p>d. Pendirian MUI (1975)</p> <p>e. Tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.</p>	<p>a. Rezim berupaya untuk menanamkan budaya politik yang memandang bahwa negara akan dalam bahaya jika kelompok Islam Politik atau Komunis mengambil kekuasaan (1970-an).</p> <p>b. Rezim mempromosikan lembaga agama negeri Al-Azhar sebagai otoritas utama dalam hal keagamaan.</p> <p>c. Media rezim Sadat menyorot simbol-simbol dan retorika keislaman Sadat seperti shalat Jumat, pakaian gamis, tasbih, kutipan dari Al-Qur'an, dll. (1970-an)</p> <p>d. Penyusunan kabinet dengan cara yang menunjukkan citra keislaman Mesir (1970-an)</p> <p>e. Mengambil tindakan represif terhadap Paus Shenouda karena dianggap provokator anti-kerukunan umat beragama (1981)</p> <p>f. Menggalang dukungan agar keanggotaan Mesir dalam OKI dicairkan kembali (1979)</p>	<p><b>a. Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat persamaan signifikan</li> <li>2. kedua rezim berupaya agar ciri-ciri keislaman tidak menjadi identik dengan kelompok Islam Politik.</li> </ol> <p><b>b. Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propaganda rezim Sadat anti-Islam Politik digencarkan setelah kekuatan Islam Politik mulai menantang kekuasaannya, sedangkan propaganda rezim Soeharto hanya mengantisipasi kekuatan Islam Politik.</li> <li>2. Sadat lebih banyak menonjolkan simbol-simbol keislaman daripada Soeharto dalam menjalankan politik citra tetapi kurang efektif akibat kondisi ekonomi dan perjanjian damai dengan Israel yang dipaksakan oleh kondisi Mesir pada saat itu.</li> </ol>
---------------------------------------	--	--	--

**B. Strategi Akomodasi**

1. Aspek Sosial-Keagamaan	<p>a. Bertambahnya jumlah aktivis Islam dalam jabatan birokrasi sejak pertengahan (1980-an)</p> <p>b. Memberi amnesti kepada tahanan-tahanan dari tokoh-tokoh dan aktivis Islam Politik (1966-1990-an)</p> <p>c. Mencabut larangan berjilbab bagi siswi-siswi Islam dalam lembaga pendidikan menengah pada jam sekolah (1982)</p> <p>d. Pendirian ICMI (1980)</p> <p>e. Peresmian Bank Muamalat Indonesia (1991)</p> <p>f. Penghapusan SDSB (1993)</p> <p>g. Keputusan koordinasi Basis (1991)</p> <p>h. Penyelenggaraan Festival Budaya Islam Istiqlal (1991 dan 1995)</p> <p>i. Berdirinya DDII (1967) dan LIPPM, (1986).</p>	<p>a. Pembebasan para tahanan Islam Politik dari IM dan kelompok radikal (1972)</p> <p>b. anggota IM diberikan kebebasan dan dukungan untuk menguasai pelbagai organisasi masyarakat sipil seperti persatuan mahasiswa kampus, serikat buruh, dll. (1972-1977)</p> <p>c. pemberian izin terbit kembali untuk media pers IM seperti Majalah Ad-Dakwah (1975).</p> <p>d. Peresmian <i>Faisal Islamic Bank of Egypt</i> (1978) dan <i>Islamic International Bank for Investment and Development</i> (1980).</p>	<p><b>a. Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat persamaan signifikan</li> <li>2. Digunakan sebagai strategi untuk mengatasi krisis kekurangan dukungan elite politik partai yang berkuasa. Akomodasi itu diawasi juga oleh negara.</li> </ol> <p><b>b. Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Islam Politik Radikal diberikan kebebasan oleh rezim Sadat sedangkan rezim Soeharto memberikan kebebasan hanya kepada kelompok Islam Politik Kultural-Substansialistik.</li> </ol>
---------------------------	---	--	---

2. Aspek Politik Hukum	<p>a. Disahkannya beberapa produk hukum khusus umat Islam seperti UUPN (1988), UUPA (1989), KHI (1991).</p> <p>b. kompromi dengan kelompok Politik Islam dalam mengesahkan UU Perkawinan no. 1/1974.</p>	<p>a. Penetapan Syariat Islam sebagai sumber utama legislasi Mesir (1980).</p> <p>b. Pembentukan komisi-komisi dalam parlemen untuk kodifikasi Syariah (1980-1981).</p> <p>c. Disahkannya beberapa produk hukum yang melarang pelanggaran terhadap Syariah Islam, ateisme, pelecehan agama dan libertinisme seperti UU Partai Politik no. 40/1977 (pasal 4), dan UU Anti-Pelecehan Nilai-Nilai Luhur (pasal 3) (1980).</p>	<p><b>a. Persamaan</b></p> <p>1. Inkorporasi Syari'at Islam dalam perundang-undangan nasional Mesir dan Indonesia tidak sampai menghasilkan penerapan syariah Islam secara utuh karena hal tersebut bertentangan dengan dasar kemajemukan negara.</p> <p><b>b. Perbedaan</b></p> <p>1. Akomodasi politik hukum Sadat menyebabkan kekha-watiran kelompok agama minoritas (Kristiani) karena menyangkut UUD sedangkan akomodasi rezim Soeharto tidak memunculkan kekhawatiran itu.</p>
------------------------	--	--	--

## B. Interpretasi Rasio Persamaan dan Perbedaan

Berdasarkan tabel di atas tentang perbandingan persamaan dan perbedaan kebijakan kedua rezim terhadap Islam Politik, maka rasio perbandingan itu dapat diinterpretasi seperti berikut:

1. Kebijakan kedua rezim terhadap institusi Islam Politik memiliki tingkat persamaan yang signifikan dalam pola dan tujuan tetapi beda dalam urutan dan taktik kebijakan.
2. Tujuan kebijakan itu adalah memaksimalkan kekuatan dan keuntungan rezim dan mengalahkan kekuatan institusi Islam Politik demi mewujudkan stabilitas politik dan menghindari potensi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan rezim. Kebijakan itu dapat disebut *hegemonic regime's domestic political stability strategy* (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis).
3. Strategi subjugasi diintensifkan setelah tercapainya konsolidasi kekuatan rezim, sedangkan strategi akomodasi diintensifkan pada saat rezim berupaya untuk menghindari potensi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan. Ini berarti bahwa perkembangan situasi dalam negerilah yang menentukan

pola strategi dan taktik yang dapat digunakan sesuai tujuan jangka panjang rezim. Kebijakan semacam ini disebut *mixed scanning policy*.

4. Keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut tidak lepas dari sistem partai dominan dan kesetiaan aparat keamanan negara serta kesetiaan elite partai politik dominan yang berkuasa (Golkar di Indonesia dan NDP di Mesir). Keberhasilan kebijakan peminggiran terhadap institusi Islam Politik tampak dalam penyingkiran agama sebagai asas suatu partai politik.
5. Meskipun kedua rezim secara *de jure* mengadopsi sistem demokrasi konstitusional sebagai pengganti sistem politik otoriter presiden sebelumnya, tetapi kedua rezim tidak mengaplikasikan sistem demokrasi liberal secara ideal sehingga akhirnya demokrasi berubah menjadi otoritarianisme atau *constitutional dictatorship*, di mana lembaga eksekutif lebih berkuasa daripada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif berkat dukungan dari partai dominan dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kedua rezim itu tidak sepenuhnya beda dari kebijakan rezim sebelumnya di negara masing-masing.

Kekuatan Islam Politik diperketat dan diawasi sehingga ruang kebebasannya menjadi sempit, padahal kebebasan berpolitik adalah ciri utama sistem demokrasi liberal. Pelbagai undang-undang disahkan, dijelaskan dan diamalkan sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Badan intelegensi negara terlalu ketat mengawasi kegiatan Islam Politik. Banyak aktivis Islam Politik yang ditangkap dengan tuduhan mengancam kesatuan dan persatuan negara. Hasil pemilihan umum juga direkayasa agar partai yang berkuasa menang telak. Secara umum, kebijakan Soeharto terkesan lebih efisien dan hati-hati daripada kebijakan Sadat baik dalam hal intervensi maupun akomodasi terhadap Islam Politik dan juga dalam hal menangani politik identitas kaum minoritas.

6. Kebijakan kedua rezim terhadap institusi Islam Politik tidak merupakan kebijakan terhadap Islam itu sendiri sebagai agama atau masyarakat Islam sebagai pengikut agama Islam. Politik keagamaan kedua rezim memelihara amanat konstitusi yang menjamin kebebasan aktivitas keagamaan yang murni berhasil memadukan antara sekularisme dan agama dalam tatanan hidup masyarakat. Penggunaan Islam sebagai dasar perjuangan demi kekuasaan politik oleh institusi Islam Politik tidak berarti bahwa Islam sebagai agama dihadapi atau disaingi oleh masyarakat Islam yang bergabung dalam kekuatan-kekuatan politik lainnya yang menggunakan dasar atau ideologi lain. Perbedaannya hanya pada tataran pandangan relasi agama dengan negara, dan pandangan apapun tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur religiusitas atau taat beragama. Hal ini terbukti dengan melihat bahwa presiden Soeharto dan presiden Sadat pernah mengenyam pendidikan agama pada masa

kecil masing-masing. Oleh karena itu, peneliti membantah pandangan beberapa peneliti lain bahwa kekuasaan politik merupakan persaingan antara kelompok abangan sekuler dengan kelompok santri agamis.

7. Terpinggirnya institusi Islam Politik tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan rezim yang berkuasa; yaitu institusi kekuatan Islam Politik bukan hanya objek dalam hal ini tetapi juga subjek. Terjadinya perselisihan pendapat bahkan konflik dan perpecahan internal dalam institusi Islam Politik mengurangi basis dukungan dari masyarakat Islam. Jika hasil pemilihan-pemilihan umum dapat dipercaya sebagai standar ukuran dukungan massa kepada kekuatan politik, maka tampak bahwa rezim Soeharto dan Sadat mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat Islam.
8. Berdasarkan hubungan yang sangat erat dan mesra antara rezim Orde Baru dan Anwar Sadat, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pertukaran pengalaman dan strategi antara kedua-duanya mengenai cara menghadapi kekuatan Islam Politik. Hal ini memberikan sudut pandang baru mengenai tingkat persamaan yang signifikan antara kedua rezim dalam hal strategi kebijakannya terhadap institusi Islam Politik dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut masyarakat Islam.

### C. Signifikansi Hasil Analisis berdasarkan Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Signifikansi hasil analisis dalam penelitian ini dapat dilihat dari titik-titik perbedaan terhadap karya-karya ilmiah yang telah direview dalam tinjauan pustaka dan juga sumbangannya kepada kerangka teori.

1. Dari aspek ontologis, studi kasus representatif ini menjabarkan komparabilitas kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik dengan menggunakan data yang reliabel dalam bentuk narasi, tabel dan grafik.
2. Dari aspek epistemologis, penelitian ini mengkaji kebijakan-kebijakan kedua rezim terhadap institusi Islam Politik dengan menggunakan teori kebijakan sehingga peneliti akhirnya merumuskan pola strategi kebijakan rezim Soeharto dan Sadat terhadap institusi Islam Politik sebagai *hegemonic regime's domestic political stability strategy* (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis). Tujuan utama kebijakan itu adalah mewujudkan stabilitas politik dan menghindari potensi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan rezim dengan cara mengatasi kekuatan institusi Islam Politik.

Sebagai contoh pembuktian, saat presiden Sadat baru menjabat dan ingin mengkonsolidasikan kekuatan politiknya terhadap kelompok Nasseris dan kelompok Kiri, ia membebaskan tahanan *Ikhwanul Muslimin* dan membolehkan organisasi itu bergerak bebas dalam aktivitas-aktivitas masyarakat sipil guna menyingkirkan kekuatan kelompok Nasseris dan kelompok Kiri. Tetapi setelah dia menang dalam Perang *Yom Kippur* melawan Israel dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat serta memiliki partai politik yang dominan tanpa adanya campur tangan politik dari kalangan militer, maka akhirnya Sadat mulai menyingkirkan kekuatan *Ikhwanul Muslimin*.

Begitu pula dengan presiden Soeharto; pada awal masa jabatannya dia bekerja sama dengan institusi Islam Politik guna membasmi kelompok Komunis, tetapi setelah ia mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan kalangan militer (ABRI)

yang memiliki kekuatan politik yang signifikan dan juga berkat keberhasilan program pembangunannya, ia mulai mensubordinasi kekuatan Islam Politik dan kekuatan politik oposisi lainnya. Tetapi di ujung pemerintahannya pada dekade 1990-an, ia kembali merangkul kelompok aktivis Islam karena menurunnya dukungan politik dari sebagian kalangan militer yang tidak lagi sehaluan dengan presiden dan juga karena meningkatnya kelas menengah dari kalangan aktivis Islam.

Kebijakan-kebijakan kedua rezim diklasifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini dengan cara yang berbeda dari karya-karya ilmiah yang telah direview dalam tinjauan pustaka. Karya-karya tersebut memiliki lingkup dan tujuan serta metode yang berbeda dari penelitian ini sehingga boleh dikatakan bahwa penelitian ini memberi sumbangan akademik yang baru.

Kajian ini dengan jelas tidak memverusulkan rezim Soeharto dan Sadat dengan agama Islam karena Islam adalah agama mayoritas penduduk negara dan juga agama yang dianut oleh kedua presiden. Di samping itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadinya pertukaran pengalaman dan strategi antara kedua rezim mengenai cara menghadapi kekuatan Islam Politik. Kemungkinan itu memang didukung oleh beberapa bukti yang nyata, seperti pengesahan undang-undang keluarga Islam yang baru No. 40/1979 yang diprakarsai oleh Jihan Sadat setelah kunjungannya ke Indonesia. Undang-undang tersebut memiliki persamaan yang banyak dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia.

3. Dari aspek aksiologis, kajian ini dapat pula dianggap sebagai titik awal perbandingan antara kedua rezim tersebut dalam seluruh aspek lainnya seperti ekonomi, politik luar

negeri, HAM, dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu, penelitian dapat memberi gambaran awal atau hipotesis mengenai arus utama kebijakan-kebijakan rezim-rezim otoriter di dunia Islam terhadap institusi Islam Politik, karena Mesir dan Indonesia merupakan dua negara Islam yang sangat berpengaruh di seluruh dunia Islam terutama di kawasan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan kajian politik dunia Islam dapat berkembang sehingga menghasilkan teori-teori baru mengenai institusi Islam Politik di masa kini yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan di negara-negara pluralis mayoritas Muslim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Kebijakan politik kedua rezim diklasifikasikan ke dalam dua strategi besar, yaitu: strategi subjugasi kekuatan Islam Politik dan strategi akomodasi. Strategi pertama mencakup:
  - a. Modus kekerasan dan peminggiran; dan
  - b. Modus propaganda dan politik citra. Strategi kedua mencakup dua aspek, yakni: aspek sosial-keagamaan, dan aspek politik hukum. Strategi subjugasi diterapkan setelah tercapainya konsolidasi kekuatan rezim, sedangkan strategi akomodasi diterapkan pada saat rezim berupaya untuk menghindari potensi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan.
2. Kebijakan-kebijakan itu memiliki persamaan yang signifikan dan komparabel dalam pola dan tujuan tetapi berbeda dalam urutan dan taktik penerapan sehingga dapat dikatakan bahwa formal-tidaknya institusi Islam Politik tidak memiliki dampak

- yang besar terhadap kebijakan rezim yang berkuasa terhadap institusi Islam Politik dalam rangka persaingan politik. Soeharto mengintensifkan kebijakan akomodasi menjelang akhir rezimnya sementara Sadat mengintensifkan kebijakan akomodasi pada awal pemerintahannya. Di sisi lain, Sadat mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan menjelang akhir rezimnya, sedangkan Soeharto mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan jauh sebelum menjelang akhir rezimnya, yaitu langsung setelah masa konsolidasi rezimnya.
3. Kebijakan kedua rezim hegemonis itu terhadap Islam Politik adalah sama-sama pragmatis realistik untuk memaksimalkan kekuatan dan keuntungan rezim dan mengalahkan semua kekuatan institusi Islam Politik dengan tujuan memujudkan stabilitas politik dan menghindari terjadinya krisis legitimasi akibat kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, Peneliti merumuskan pola kebijakan-kebijakan itu sebagai *hegemonic regime's domestic political stability strategy* (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis). Dukungan Militer dan sistem partai dominan adalah dua hal yang menopang sikap hegemonis rezim terhadap Islam Politik. Kedua rezim tidak mengaplikasikan sistem demokrasi liberal secara ideal sehingga akhirnya demokrasi berubah menjadi otoritarianisme. Persamaan dan perbedaan yang ada antara kebijakan masing-masing rezim terhadap Islam Politik mencerminkan persamaan dan perbedaan dalam kondisi dalam negeri di negara masing-masing.
  4. Kebijakan-kebijakan kedua rezim terhadap institusi Islam Politik bukan kebijakan terhadap agama Islam itu sendiri, mengingat bahwa kedua presiden itu beragama Islam dan mayoritas penduduk negaranya beragama Islam. Terpinggirnnya institusi Islam Politik tidak sepenuhnya

- disebabkan oleh kebijakan rezim yang berkuasa; yaitu institusi kekuatan Islam Politik bukan hanya objek dalam hal ini tetapi juga subjek. Terjadinya perselisihan pendapat bahkan konflik dan perpecahan internal dalam institusi Islam Politik mengurangi basis dukungan dari masyarakat Islam.
5. Kebijakan yang terkait dengan kekerasan, intervensi atau peminggiran dilegitimasi dengan memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu sebagai landasan yang sah. Masing-masing rezim mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan pada masa puncak konsolidasi rezimnya. Namun pada masa adanya potensi krisis legitimasi kekuasaan dan stabilitas sistem politik, rezim lebih memilih kebijakan akomodasi terhadap Islam Politik.
  6. Ada kemungkinan bahwa hubungan erat antara kedua negara mencakup pertukaran pengalaman dan kebijakan dalam hal menghadapi institusi Islam Politik.
  7. Kebijakan akomodasi rezim Anwar Sadat terhadap Islam Politik memberikan ruang kebebasan yang luas bagi kelompok Islam garis keras sedangkan rezim Soeharto hanya mengakomodir aktivisme Islam moderat yang bersifat substantivistik bukan legal-formalistik.
  8. Reaksi Islam Politik di Indonesia menjelang akhir rezim Soeharto berbentuk transformasi dari corak legal-formalistik menjadi substantivistik, tetapi reaksi Islam Politik di Mesir menjelang akhir rezim Anwar Sadat memiliki spektrum yang bervariasi mulai dari gerakan garis keras hingga gerakan moderat.
  9. *Ikhwanul Muslimin* arus utama (*main stream Muslim Brotherhood*) dan PPP dianggap mencerminkan Islam Politik yang moderat dan dapat menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1976. *Public Policy Making*. New York: Praeger Publishers.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Luqman Hakim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Ayoob, Mohammed. 2008. *The Many Faces of Political Islam*. Michigan: University of Michigan Press.
- Ayubi, Nazih. 1991, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London and New York: Routledge.
- Basyir, A.A. 1985. *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: UII Press.
- Benin, J and Stork, J. 1997, *Political Islam: Essays from Middle East Report*. New York: I.B. Tauris Publisher.
- Case, William. 2002. *Politics in Southeast Asia: Democracy Or Less*. London: Routledge Curzon.
- Dekmejian R. Hrair. 1988. "Islamic Revival: Catalysts, Categories and Consequences" in Shireen T. Hunter (ed.). *The Politics of Islamic Revivalism*. (Bloomington: Indiana University Press.

- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Etzioni Amitai. 1968. *Mixed Scanning: A Third Approach to Decision-Making*. Public Administration Review. Vol. 27.
- Elson, Robert E. 2001. *Suharto: A Political Biography*. UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Esposito, John L.(ed.). 1987. *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*. (Oxford: Oxford University Press.
- Fachir, A.M. 2009. *Potret Hubungan Indonesia-Mesir*. Cet.I. Cairo: KBRI.
- Fuller, Graham. 2003. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave.
- Goldschmidt, Arthur. 2002. *A Concise History of the Middle East*. 7<sup>th</sup> ed. (Colorado: Westview Press.
- Goodin, Robert E. and Hans Dieter Klingemann. 1988. *A New Handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Hagopian, Mark N. 1978. *Regimes, Movements and Ideologies*. New York: Longman.
- Hague, Rod, Martin Harrop & Shaun Breslin. 1998. *Comparative Politics and Government: An Introduction*. 4<sup>th</sup> ed. London: MacMillan.
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Palgrave.
- Hilmy, Masdar. 2010. *Islamism and Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Islam, Syed Sirajul. 2005. *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson.
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: CV. Rajawali.
- . 1985. *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Lipset, Seymour Martin (ed.). 1995. *The Encyclopedia of Democracy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Macridis, Roy C. and Bernard E. Brown (eds.). 1997. *Comparative Politics: Notes and Readings*. 5<sup>th</sup> ed., Homewood, Il.: The Dorsey Press.
- Nathan, K.S. & Mohammad Hashim Kamali. 2005. *Islam in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Peretz, Don. 1986. *The Middle East Today*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Strange, Susan. 1996. *The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy*. (Cambridge University Press.
- Roy, Oliver. 1996. *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Varma, S.P. 1999. *Teori Politik Modern*. Cet.5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS.